

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
DI INDONESIA PERIODE 1980-1999**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Theodorus Dedi D.

NIM : 972114046

NIRM : 970051121303120044

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2002**

Skripsi
PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
DI INDONESIA PERIODE 1980-1999

Oleh :

Theodorus Dedi D.

NIM : 972114046

NIRM : 970051121303120044

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

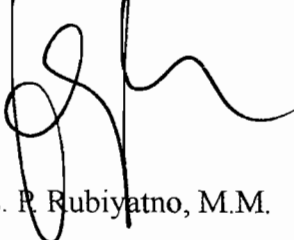
Tanggal : 29 April 2002



Dra. Y.F. Gien Agustinawansari, M.M, Akt.

Pembimbing II

Tanggal : 4 Mei 2002



Drs. R. Rubiyatno, M.M.

Skripsi
PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
DI INDONESIA PERIODE 1980-1999

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Theodorus Dedi D.

NIM : 972114046

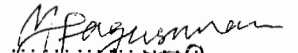
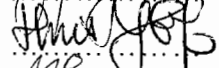
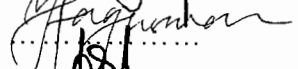

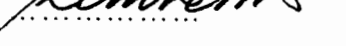
NIRM : 970051121303120044

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 18 Mei 2002

Dan dinyatakan memenuhi syarat

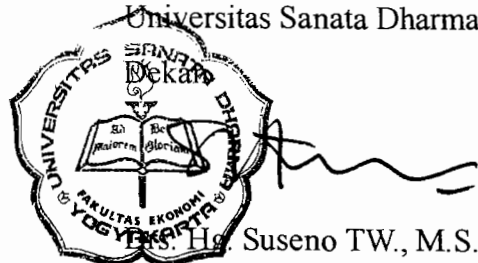
Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	Dra. Y.F. Gien Agustinawansari, M.M, Akt.	
Sekretaris	Ir. Drs. Hansiadi Y.H., M.Si, Akt.	
Anggota	Dra. Y.F. Gien Agustinawansari, M.M, Akt.	
Anggota	Drs. P. Rubiyatno, M.M.	
Anggota	Fr. Reni Retno A., S.E, M.Si, Akt.	

Yogyakarta, 24 Mei 2002

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



H. Suseno TW., M.S.

Motto : Lakukanlah sesuatu berdasarkan pada apa yang anda yakini

*Bentuk keberadaan intelektual
tidak bisa lagi terdapat pada kefasihan berbicara
yang merupakan gerak luar dan sementara saja
dari perasaan dan keinginan,
namun dalam partisipasi aktif dalam kehidupan praktis
sebagai pembangun, organisator, penasehat tetap,
dan bukan semata-mata ahli pidato.*

(Antonio Gramsci, dalam Selection From The Prison Notebooks)

Kupersembahkan kepada :

Bapak dan Ibu Tercinta,

Adik-ku : Suwilang dan Abam,

Keponakan-ku : Dilip Alexader,

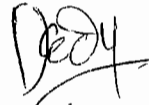
Kekasih-Ku : Bernadetta Riehi.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya ataupun bagian karya orang lain, kecuali bagian yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 6 Mei 2002

Penulis



Theodorus Dedi.D

ABSTRAKSI

PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA PERIODE 1980-1999

Theodorus Dedi.D
Universitas Sanata Dharma
2002

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan adalah studi empiris. Studi empiris dilakukan dengan meneliti pengaruh produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia selama periode 1980-1999. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis korelasi Karl Pearson dan koefisiensi determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk domestik bruto mempengaruhi secara positif penerimaan pajak penghasilan. Hal ini diperoleh dari perhitungan nilai $r = 0,822$. Besarnya pengaruh produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan adalah 68%. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil perhitungan koefisiensi determinasi dengan nilai $r^2 = 0,68$

ABSTRACTION

THE INFLUENCE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT TOWARD THE INCOME TAX ACCEPTANCE IN INDONESIA PERIOD 1980-1999

**Theodorus Dedi D.
Sanata Dharma University
2002**

This research aimed to find out the influence of gross domestic product toward the income tax acceptance. The method of the research was empirical study. The research observed the influence of gross domestic product toward the income tax during 1980-1999. The data analysis technique was Karl Pearson's Correlation and the coefficient of determination.

The result research showed that gross domestic product influenced positively toward the income tax acceptance. This conclusion obtained by the calculation of $r = 0,822$. The influence of gross domestic product toward income tax was 68 %. It was obtained by the counting result of coefficient determination with the value of $r^2 = 0,68$.

KATA PENGANTAR

Layak kiranya jika saya memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat akal dan budi yang diberikannya skripsi ini bisa selesai sesuai dengan rencana sebelumnya. Menjadi sebuah kenikmatan tersendiri bagi saya mengerjakan seluruh proses penyusunan skripsi ini, terutama membantu memperluas wacana yang saya miliki.

Banyak pihak yang cukup membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Suseno Triyanto Widodo, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Fr. Reni Retno Anggraini, S.E, M.Si, Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Dra. Y. F. Gien Agustinawansari, M.M, Akt., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar melayani konsultasi dan banyak memberikan masukan selama penulisan skripsi ini.
4. Drs. P. Rubiyatno, M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan bagi penulisan skripsi ini.
5. Drs. Titus Odong Kusumajati, M.A., yang banyak memberikan masukan dan selalu siap berdiskusi baik yang berhubungan dengan skripsi maupun persoalan sosial kemasyarakatan.

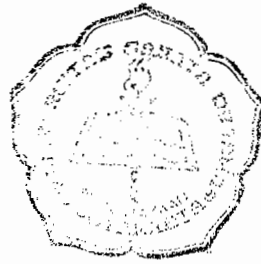
6. Semua Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah berbagi ilmu dengan penulis.
7. Seluruh karyawan sekretariat Fakultas Ekonomi yang selalu melayani dengan ramah dan lumayan cepat selama proses skripsi maupun ketika mahasiswa.
8. Saudaraku di Komunitas Perkutut 320 : Om Gugum Harso, Pak Bos Willy Halawa, Mas Yudha, Aji Pratomo, Kraeng John Sweet, Bang Herwin Purba, Kraeng Leksi, Mas Hendra, Mas Bimo Fadly. *Matur nuwun* atas kebersamaan kita yang penuh pengertian dan saling mendewasakan. Selamat mengejar mimpi dan tetap selalu menjaga tradisi intelektual kita.
9. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma : Asty, Ila, Sumiyati, Mimin, Christ, Bambang, Budiman, Laely, Era, Lia, Ade dan yang lainnya. Semoga menjadi alumni yang membanggakan kampus seribu jendela.
10. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJ) periode 1999-2000, Mawar, Ani, Suko, Wahyu dan lain-lain. Terima kasih atas kerjasamanya dan semoga kita mampu berkarya lebih baik lagi ditempat yang lain.
11. Teman-teman Penelitian Bursa Efek Jakarta 2000 : Geby, Decky, Indar, Theo, Mitha, dan Pram, terima kasih karena kita sudah menjadi tim yang hebat. Tour satu minggu-nya akan selalu menjadi kenangan yang indah.
12. Kawan-kawan Pengurus Harian PMKRI Cabang Yogyakarta periode 1999-2001 : Lia, Iwit, Melky, Goris, Ika, Ardy, Ory, Alvon. Terima kasih atas kerjasamanya, saya sungguh belajar banyak dari kawan-kawan semua.

13. Kawan-kawan Pengurus Harian PMKRI Cabang Yogyakarta periode 2001-2002 : Alvon, Rudy, Yanto, Elias, Ory, Harry, Tutut, Roery, Ika. Semoga kita selalu tetap menjaga idealisme dimanapun kita berkarya.
14. Kawan-kawan Alumni Muda PMKRI di Jakarta : Endi, Budi, Ardy, Goris, dan lain-lain, terima atas bantuannya selama penelitian di Jakarta. Saya menunggu gagasan kalian di media massa.
15. Bernadetta Richi, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku, aku akan selalu mengingatnya.
16. Maria Ety Istiningrum, terima kasih atas sekian model bantuannya, semoga studinya juga segera selesai.
17. Hetty Susana Pidang, terima kasih sering mengirim kabar yang senantiasa memberiku semangat untuk terus belajar tentang banyak hal.
18. Sisilia, Theresia Vita, Agustina, Yovita, Ana widiastruti, Estiarti, Ian puspiyani, Shety : hidup terasa menjadi lebih indah karena dipertemukan dengan kalian.
19. Adik Eliana, Elvina Shanti, Regina Cici, Michael Hermawan semoga tetap semangat dalam menyelesaikan studinya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari keadaan sempurna. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima masukan demi perbaikan mutu skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat, terutama bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang serupa.

Penulis

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iv
ABSTRAKSI BAHASAINDONESIA.....	v
ABSTRAKSI BAHASA INGGRIS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DARTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak.....	7
B. Pajak Penghasilan.....	8

C. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemungutan Pajak.....	10
D. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.....	14
1. Pengertian Produk Domestik Bruto.....	14
2. Metode Perhitungan Produk Domestik Bruto.....	15
3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.....	17
4. Faktor Penentu Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.....	19
5. Teori-teori Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.....	20
E. Pengaruh Pajak Penghasilan Dalam Perekonomian.....	22
1. Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Jam Kerja.....	24
3. Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Investasi.....	25
F. Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
D. Data Penelitian.....	29
E. Variabel Penelitian dan Pengukurannya.....	29
F. Hipotesis.....	29
G. Teknik Pengumpulan Data.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV	GAMBARAN UMUM PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA.....	34
	A. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia.....	34
	1. Perekonomian yang Berorientasi Pertumbuhan.....	34
	2. Pergeseran Struktur Perekonomian dari Sektor Pertanian ke Sektor Industri.....	36
	B. Perpajakan di Indonesia.....	37
	1. Reformasi Perpajakan.....	37
	2. Perkembangan Penerimaan Pajak Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan.....	39
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	43
	A. Analisis Data.....	43
	1. Deskripsi Data.....	43
	2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	46
	B. Pembahasan.....	49
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran.....	52
	C. Keterbatasan Penelitian.....	53
	DAFTAR PUSTAKA.....	55
	LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	: Produk Domestik Bruto Indonesia Periode 1980-1999.....	44
Tabel 5.2	: Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia Periode 1980-1999.....	45
Tabel 5.3	: Perhitungan Koefisiensi Korelasi Berdasarkan Rumus Karl Pearson's.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya mayoritas negara sedang berkembang mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan karena secara umum negaranya rata-rata memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Perkembangan berikutnya menyadarkan negara berkembang bahwa sumber daya alam tidak bisa terus menerus dijadikan sebagai tumpuan pembiayaan pembangunan. Selain sumber daya alamnya sendiri yang semakin menipis, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa disertai konservasi yang memadai akan menimbulkan kerusakan ekosistem alam yang memiliki dampak jangka panjang serta berbagai dampak sosial lainnya yang mungkin timbul.

Berangkat dari pertimbangan diatas, negara sedang berkembang mulai mengalihkan sumber pembiayaan pembangunannya dari sumber daya alam ke sektor pajak. Pajak menjadi sumber yang menjanjikan mengingat pemerintah memiliki legitimasi untuk melakukan pemungutan, termasuk secara paksa. Sektor pajak menjadi sektor yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia. Sektor pajak menyumbang sekitar 68,3% dari total penerimaan pemerintah Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2001 lalu.

Membangun kemandirian sumber pembiayaan pembangunan domestik salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Selama ini pemerintah Indonesia selalu menutupi setiap kekurangan anggaran tahunannya dengan pinjaman luar negeri. Kini Indonesia seolah terjebak dalam lingkaran hutang yang dibuatnya sendiri. Jumlahnya semakin membesar dan angsuran pokok maupun bunganya semakin memberatkan APBN. Pemobilisasian penerimaan pajak menjadi salah satu alternatif memberdayakan sumber-sumber pembiayaan pembangunan domestik dan akan semakin mengurangi ketergantungan kita terhadap pinjaman luar negeri.

Ketika krisis moneter melanda Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya pertengahan tahun 1997 yang akhirnya berujung pada krisis multidimensional yang berlangsung sampai saat ini, menjadi kekawatiran umum bahwa kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan menjadi semakin rendah. Akibatnya akan semakin banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang tak mampu tertangani. Salah satu yang menyebabkan penerimaan pemerintah rendah adalah potensi penerimaan pajak yang rendah pula, disamping sumber-sumber penerimaan lainnya yang juga rendah.

Salah satu sumber pajak yang kontribusinya cukup besar adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan relatif sensitif terhadap perubahan siklus ekonomi nasional. Penerimaan pajak penghasilan berkaitan erat dengan seberapa banyak masyarakat memperoleh tambahan kemampuan ekonomi. Tambahan kemampuan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada seberapa banyak

lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Masa resesi ekonomi ditandai oleh semakin mengecilnya kegiatan ekonomi. Masa resesi ini yang dialami negara Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.

Penelitian yang dilakukan oleh **United Nation Commision For Asia And Far East** tahun 1972 menunjukkan adanya korelasi positif antara pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita semakin besar penerimaan pajak yang akan diperoleh sebuah negara. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh produk domestik bruto (pendapatan per kapita kolektif) terhadap penerimaan pajak penghasilan.

B. Batasan Masalah

Terdapat beberapa faktor yang potensial mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan diantaranya, produk domestik bruto, tingkat keterbukaan sistem ekonomi, tingkat moneterisasi, kapasitas administrasi, falsafah politik dan kemauan memungut pajak dan perangkat undang-undang perpajakan serta aturan pelaksanaannya.

Penelitian ini hanya dibatasi pada bagaimana pengaruh produk domestik bruto nasional terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Penerimaan pajak penghasilan mencakup penerimaan pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25 serta pajak penghasilan pasal 26. Pengukuran

tingkat produk domestik bruto mengacu kepada hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ada hubungan antara produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1980-1999 ?
2. Bagaimana hubungan antara produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1980-1999 ?
3. Sejauhmana tingkat hubungan antara produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1980-1999 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1980-1999 ?
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1980-1999 ?
3. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat hubungan antara produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1980-1999 ?

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang nantinya menjadi acuan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan berpikir mahasiswa, dengan harapan ada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan berpikir serta melengkapi pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berusaha diuraikan teori-teori yang ada relevansinya dengan pajak, pajak penghasilan, produk domestik bruto, pengaruh

pajak dalam perekonomian, dan pengaruh produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan.

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini dikemukakan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan cara analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pajak

Bab ini berisi gambaran umum tentang produk domestik bruto di Indonesia dan penerimaan pajak di Indonesia.

BAB V Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini, hasil penelitian yang telah dilakukan dianalisis sesuai dengan teori untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan dikemukakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran bagi pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian maupun bagi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Cukup banyak para ahli yang mencoba memberikan rumusan tentang definisi pajak. Diantaranya yang dikemukakan oleh Prof Dr. P.J.A. Andriani :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (Andriani, 1991:2).

Sementara itu, dalam bukunya “Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan”(1990), Prof. Dr. Rochmat soemitro, S.H. Memberikan definisi bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” (Sumitro,1990:5). Dari dua pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara sebagai biaya untuk menjalankan tugas-tugas negara, dimana masyarakat pembayar tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk.

Dilihat dari sudut fungsinya, pajak memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah. Hal ini menjadi konkrit sekali dengan dimasukkannya pajak sebagai sumber penerimaan utama dalam APBN. Ketika pajak adalah sumber utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan, secara otomatis menegaskan bahwa masyarakat adalah pemegang kedaulatan yang menentukan jalanya sebuah pemerintahan.

2. Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan. Contoh lain, dikenakannya pajak yang tinggi untuk konsumsi barang mewah. Harapannya akan terjadi pengalihan pendapatan dari kalangan ekonomi menengah keatas ke pada negara yang selanjutnya didistribusikan untuk kepentingan publik.

B. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak dimaksud tidak untuk dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Pengenaan pajak

penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan pajak adalah :

1. Hadiah dari undian atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan.
2. Laba usaha.
3. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan hutang.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemungutan dan Penerimaan Pajak

Tiap negara menghadapi masalah yang berbeda dalam melakukan pemungutan pajak, demikian juga tingkat keberhasilannya. Salah satu ukuran yang digunakan adalah ratio penerimaan pajak terhadap *Gross National Product*

(GNP) (Tubagus, 1992:30). Perbedaannya akan lebih besar lagi apabila dibandingkan antara negara sedang berkembang dan negara maju. Negara maju, dimana tingkat pendapatan per kapitanya sudah tinggi, ratio penerimaan pajak terhadap GNP umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang pendapatan per kapitanya rendah. Pendapatan per kapita merupakan determinan penting dalam penerimaan pajak.

Bila dibandingkan antar negara sedang berkembang, faktor pendapatan per kapita tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. Namun perbedaan penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain yakni tingkat keterbukaan sistem ekonomi, tingkat moneterisasi, tingkat kapasitas administrasi, falsafah politik dan kemauan pemungutan pajak serta perangkat undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

Keterbukaan sistem ekonomi diukur berdasarkan tingkat kemudahan dari suatu negara untuk melakukan transaksi ekonomi dengan negara lain. Saat ini Indonesia memiliki sistem ekonomi yang sangat terbuka sebagai dampak dari liberalisasi dan deregulasi yang dilakukan secara terus menerus semenjak pertengahan tahun 1997. Keterbukaan sistem ekonomi ini ditandai oleh beberapa indikator misalnya kebijakan nilai tukar rupiah mengambang, dan penghapusan bertahap proteksi tarif masuk. Dengan semakin terbuka sebuah sistem ekonomi, maka dengan sendirinya akan memobilisasi transaksi ekonomi, yang didalamnya tersimpan potensi penerimaan pajak.

Tingkat moneterisasi berkaitan dengan sejauh mana alat tukar resmi atau uang digunakan oleh masyarakat dalam suatu negara dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat negara sedang berkembang, terutama mereka yang tinggal di desa-desa terpencil masih sering melakukan transaksi dengan cara menukar barang dengan barang (*barter*). Akan menjadi sulit untuk menentukan pajak dalam sebuah transaksi *barter*. Maka semakin tinggi tingkat moneterisasi, akan semakin besar potensi penerimaan pajaknya. Hanya saja belum ada klasifikasi untuk menentukan sejauh mana tingkat moneterisasi sebuah negara.

Tingkat kapasitas administrasi berkaitan dengan kemampuan memungut pajak dari aparatur pajak. Kapasitas administrasi berkaitan dengan dua hal, pertama, sistem administrasinya, kedua orang yang menjalankannya. Dengan sistem administrasi yang baik, termasuk dengan mengadopsi kemajuan teknologi, akan bisa dilayani lebih banyak wajib pajak dalam waktu yang singkat. Aparat birokrasi menjadi faktor yang menentukan kapasitas administrasi. Walaupun aparat birokrasi jumlahnya banyak bila produktivitasnya rendah, maka kapasitas administrasi menjadi rendah. Rendahnya produktivitas aparat birokrasi menjadi gejala umum dinegara sedang berkembang. Sebagai orang yang pasti dibayar, dan kecil kemungkinan untuk dipecat, aparat birokrasi merasa tidak perlu bekerja lebih keras lagi. Belum lagi bila ditambah dengan kebiasaan aparat birokrasi yang sering melakukan korupsi, pungli dan sebagainya yang bisa merusak sistem secara keseluruhan.

Pancasila merupakan dasar falsafah segala sesuatu yang hidup di Indonesia, dengan demikian pancasila juga adalah dasar falsafah politik di Indonesia. Pancasila merupakan dasar idiil negara untuk mencapai tujuannya, yaitu suatu negara yang adil dan makmur, spiritual dan material yang merata. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan uang, dan pajak merupakan sumber keuangan utama untuk mencapai tujuan itu. Pajak dijadikan bukti realisasi bakti rakyat kepada negara dalam hidup bersama yang mengandung sifat kegotong-royongan dan kekeluargaan. Dengan demikian bisa dikatakan falsafah politik Indonesia sebenarnya menjadi faktor pendorong kesadaran warga negara dalam membayar pajak.

Kemauan memungut pajak tergantung dari sejauh mana memungut pajak itu dirasa perlu oleh negara, baik karena alasan anggaran, pemerataan atau alasan lainnya. Bisa saja sebuah negara memiliki potensi pajak yang besar, tetapi negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, merasa tidak perlu memungut pajak secara optimal dari masyarakatnya.

Perangkat undang-undang menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Undang-undang menjadi landasan hukum yang kuat mengapa pemerintah memiliki hak memungut pajak dari warga negaranya. Menjadi kecenderungan umum setiap orang ingin meringankan beban pajaknya, maka selama masih ada kelemahan undang-undang orang akan tetap menghindari beban pajak. Tentu saja pelaksanaan undang-undang ini harus

diikuti oleh penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran undang-undang.

D. Produk Domestik Bruto

1. Pengertian produk domestik bruto

Produk domestik bruto adalah nilai dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama suatu periode tertentu yang diukur dalam satuan uang. Produk domestik bruto disebutkan, merupakan jasa dan barang jadi, semata-mata untuk memastikan tidak dilakukannya perhitungan ganda (*double counting*). Dalam prakteknya, perhitungan ganda dapat dihindari dengan menerapkan nilai tambah, dimana yang dihitung sebagai tambahan produk domestik bruto adalah hanya nilai tambah dari setiap tahap proses produksi atau suatu bagian proses distribusi. Tetap ada banyak kesukaran dalam menghitung beberapa komponen produk domestik bruto, misalnya dalam menilai jasa-jasa pekerjaan rumah tangga (*housepersons*), jasa polisi dan berbagai hal sejenis lainnya. Tidak ada prinsip yang seragam dalam memecahkan masalah seperti ini dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan hanya menggunakan sejumlah konvensi. (Stanley Fisher dan Rudiger.D, 1997:29-30).

Produk domestik bruto biasanya dijadikan indikator utama untuk menilai kinerja perekonomian sebuah negara. Kenaikan produk domestik bruto dari tahun ketahun disebut sebagai pertumbuhan ekonomi tanpa memandang

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Produk domestik bruto bila dibagikan dengan jumlah total penduduk akan menghasilkan produk domestik bruto per kapita. Produk domestik bruto per kapita biasanya akan dijadikan indikator untuk menilai apakah sebuah negara termasuk dalam kategori negara maju, negara sedang berkembang, atau negara miskin.

Perkembangan terakhir mengarah kepada kesepakatan ahli-ahli ekonomi pembangunan, bahwa produk domestik bruto per kapita tidak cukup handal lagi dijadikan indikator untuk mengukur kemajuan sebuah negara, karena menimbulkan bias dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Parameter kemajuan pembangunan selain produk domestik bruto per kapita juga dirasa perlu untuk dilengkapi dengan parameter lain misalnya tingkat melek huruf, mortalitas, harapan hidup, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Namun sampai saat ini produk domestik bruto per kapita tetap merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan sebuah negara.

2. Metode perhitungan produk domestik bruto

Perhitungan produk domestik bruto dapat dilakukan dengan tiga cara yakni metode produksi, metode pendapatan dan metode pengeluaran. Bila diperhitungkan secara teliti maka penggunaan ketiga cara ini akan menghasilkan nilai yang sama.

a. Metode produksi

Bila menggunakan metode produksi, produk domestik bruto suatu negara dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor dalam suatu negara selama satu tahun. Penghitungan ini harus sudah menghindari perhitungan ganda, artinya hanya menambahkan tambahan nilainya saja.

b. Metode pendapatan

Bila seluruh hasil produksi dijual, para produsen akan mendapatkan uang. Dengan uang itu mereka kemudian akan membayar para pemilik faktor-faktor produksi yang telah membantu proses produksi barang dan jasa itu. Maka produk domestik bruto dapat dihitung dengan menjumlahkan total dari upah, gaji, sewa, bunga, laba yang diterima oleh para pemilik faktor produksi sebagai balas jasa atas sumbangan mereka dalam proses produksi selama satu tahun.

c. Metode pengeluaran

Penghasilan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi itu kemudian sebagian besar akan dibelanjakan kembali yakni untuk membeli barang dan jasa hasil produksi masyarakat. Masyarakat yang membelanjakan uangnya meliputi banyak sekali orang dan institusi yang dapat dikelompokkan menjadi para konsumen, para produsen, pemerintah, dan para pembeli dari luar negeri. Dengan demikian produk domestik bruto juga dapat dihitung

dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari sekian kelompok masyarakat ini.

3. Laju pertumbuhan produk domestik bruto

Pertumbuhan PDB menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan PDB kita harus membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. PDB dikatakan tumbuh jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Perubahan nilai PDB dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua hal yakni perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga-harga. Untuk mengetahui pertumbuhan PDB perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya. Untuk itu pengaruh perubahan harga terhadap nilai PDB harus dihilangkan yakni dengan melakukan penghitungan PDB dengan menggunakan harga konstan (PDB riil).

Produk domestik bruto riil dapat ditentukan dengan cara mendeflasikan PDB menurut harga yang berlaku yaitu dengan menilainya kembali berdasarkan atas harga-harga pada tahun dasar perbandingan. Yang paling sederhana adalah dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indeks yang menunjukkan perubahan harga-harga dari barang-barang yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu.

Dengan menggunakan angka IHK produk domestik bruto riil dapat ditentukan dengan menggunakan rumus :

$$Y_{rt} = \frac{100}{IHK_t} \times Y_{bt}$$

Y_{rt} = Produk domestik bruto riil tahun t

IHK_t = Indeks harga konsumen tahun t

Y_{bt} = Produk domestik bruto menurut yang berlaku
pada tahun t

Jika produk domestik bruto riil berbagai tahun telah diperoleh maka tingkat pertumbuhan PDB dari tahun ke tahun bisa ditentukan. Laju pertumbuhan PDB pada suatu tahun tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$G_t = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}} \times 100\%$$

G_t = Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto

Y_{rt} = Produk domestik bruto riil tahun t

Y_{rt-1} = Produk domestik bruto riil tahun t-1

4. Faktor penentu pertumbuhan produk domestik bruto

Menurut Michael.P.Todaro(1998:124-127), paling tidak ada tiga hal yang menjadi komponen utama yang menentukan pertumbuhan produk domestik bruto dari setiap negara yaitu :

a. Akumulasi modal.

Akumulasi modal meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, modal dan sumber daya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut infrastruktur ekonomi dan sosial.

b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan PDB. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif. Meski demikian juga perlu dicermati bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja yang terlalu besar, yang melebihi kemampuan daya serap pasar tenaga kerja juga akhirnya bisa menimbulkan pengangguran dalam jumlah yang besar.

c. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi dalam pengertian yang paling sederhana terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional. Kemajuan teknologi ini dapat diklasifikasikan kedalam kemajuan teknologi yang netral, kemajuan teknologi yang menghemat tenaga kerja dan modal serta kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja dan modal.

5. Teori-teori pertumbuhan produk domestik bruto

a. Teori tahapan linear

Ada dua teori besar yang dikategorikan dalam teori tahapan linear ini yakni model pertumbuhan bertahap yang diajukan oleh W.W. Rostow dan model pertumbuhan Harrod-Domar. Kedua teori ini berpijak dari landasan yang sama yakni bahwa investasi dan tabungan adalah kunci utama untuk memacu pertumbuhan PDB. Dengan demikian menjadi pekerjaan utama negara yang ingin pertumbuhan PDB-nya tinggi untuk semakin memperbesar tabungan/investasinya, termasuk dengan menarik pinjaman dari luar negeri. Rostow menyebutkan ada lima tahap kemajuan ekonomi yang pasti dialami oleh sebuah negara, yakni tahapan masyarakat tradisional, tahap penyusunan kerangka dasar tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan berkesinambungan yang berlangsung secara otomatis, tahap tinggal landas, tahap menuju kematangan ekonomi, dan yang paling terakhir adalah tahap konsumsi masal. Sampai pada tingkatan

tertentu, yakni tahap tinggal landas, proses pertumbuhan berikutnya akan berlangsung secara otomatis. Sehingga yang menjadi tugas berat sebuah negara adalah menyiapkan pondasi awal agar mampu mencapai tahap tinggal landas.

b. Model perubahan struktural

Teori ini memusatkan perhatiannya pada mekanisme yang sekiranya memungkinkan negara-negara yang masih terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari pola pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, memiliki sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Tanpa proses transformasi, akan menjadi sulit bagi sebuah negara untuk memperoleh sebuah kemajuan ekonomi yang berarti. Model ini dalam analisisnya menggunakan perangkat neoklasik berupa konsep-konsep harga dan alokasi sumber daya untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi. Aliran ini didukung oleh W. Arthur Lewis yang terkenal dengan teorinya tentang surplus tenaga kerja dua sektor dan Hollis B. Chenery dengan analisis empirisnya tentang pola-pola pembangunan.

c. Revolusi ketergantungan internasional

Model ketergantungan internasional memandang dunia ketiga sebagai korban kekakuan aneka faktor kelembagaan politik dan ekonomi baik itu yang berskala domestik maupun internasional. Mereka semua telah terjebak dalam perangkap ketergantungan dan dominasi negara-negara

kaya. Agar negara berkembang dan negara miskin mampu keluar dari ketertinggalannya, perlu adanya sebuah penataan sebuah pola hubungan baru antara dunia pertama dan dunia ketiga. Pendekatan ini dapat digolongkan kedalam tiga aliran besar yakni model ketergantungan neokolonial, model paradigma palsu serta tesis pembangunan dualistis.

d. Kontrarevolusi neoklasik

Kontrarevolusi neoklasik menegaskan bahwa kondisi keterbelakangan negara sedang berkembang bersumber dari buruknya keseluruhan alokasi sumber daya yang selama ini bertumpu pada kebijakan pengaturan harga yang tidak tepat dan adanya campur tangan pemerintah yang berlebihan. Regulasi oleh pemerintah dianggap sebagai faktor yang mendistorsi berjalannya mekanisme pasar yang efisien. Oleh karena itu dengan membiarkan pasar bebas hadir dan beroperasi secara penuh, swastanisasi perusahaan milik pemerintah, promosi perdagangan bebas, pembatasan regulasi dan distorsi dan seterusnya menimbulkan efisiensi dan pertumbuhan PDB akan terpacu lebih optimal.

E. Pengaruh Pajak Penghasilan Dalam Perekonomian

Pajak penghasilan termasuk salah satu jenis pajak yang menimbulkan distorsi, walaupun secara umum, pajak penghasilan yang diterapkan secara menyeluruh akan menimbulkan distorsi yang paling kecil. Walaupun demikian ditinjau dari segi keadilan maka pajak penghasilan merupakan pajak yang

dikategorikan baik karena pajak penghasilan struktur pajaknya bisa dibuat menjadi progresif. Pajak penghasilan dikatakan mempunyai tarif yang progresif apabila prosentase pajak (terhadap pendapatan) semakin besar dengan semakin tingginya tingkat pendapatan

Menurut Henry Simons, penghasilan adalah semua penerimaan yang dapat menambah konsumsi dan meningkatkan kekayaan atau tabungan. Termasuk dalam kategori penerimaan ini adalah pertama, nilai konsumsi dalam suatu periode tertentu yang dibiayai oleh penjualan faktor-faktor produksi, pemberian dari orang lain, nilai kekayaan dalam periode tersebut. Kedua, barang-barang yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri, ketiga, kenaikan bersih dari kekayaan seseorang yang disebabkan oleh naiknya tabungan dalam suatu periode tertentu atau kenaikan dari nilai kekayaan yang dimiliki. Keempat, nilai dari barang-barang yang jangka waktu penggunaannya lama.

Definisi yang dibuat oleh Henry Simons diatas sangatlah luas cakupannya. Walaupun sering digunakan dalam analisis ahli-ahli ekonomi, namun tetap mengalami kesulitan dalam menghitung pendapatan, terlebih lagi dalam menghitung pendapatan di negara-negara sedang berkembang. Semakin banyak unsur pendapatan yang disebutkan oleh Henry Simons ini tidak diperhitungkan sebagai pendapatan oleh pemerintah, maka terdapat kecendrungan timbulnya ketidakadilan dalam struktur pajak. (Guritno, 2001 :255-256).

1. Pengaruh pajak penghasilan terhadap jam kerja

Asumsi dasarnya bahwa waktu hanya dibagi antara waktu luang dan waktu kerja, sehingga dalam waktu sehari semalam waktu yang tidak digunakan untuk bekerja adalah waktu luang. Asumsi lainnya, setiap orang dianggap mempunyai dua sumber pendapatan yaitu dari kerja dan dari kekayaannya. Adanya pajak penghasilan akan menyebabkan individu mengubah alokasi penggunaan waktunya.

Pajak penghasilan selain mempunyai efek pendapatan (*income effect*) juga mempunyai efek substitusi (*substitution effect*). Efek substitusi menunjukkan apa yang terjadi dengan waktu luang apabila tarif upah berubah. Adanya pajak penghasilan menyebabkan pendapatan bersih yang diterima oleh seseorang akhirnya berkurang karena harus membayar pajak. Pajak penghasilan yang mengurangi jumlah pendapatan yang diterima menyebabkan kerja menjadi relatif lebih mahal dari sebelum adanya pajak dan waktu luang menjadi lebih murah. Efek substitusi dari pajak penghasilan akan menyebabkan orang bekerja lebih sedikit dan waktu luang bertambah banyak.

Efek pendapatan dari pajak penghasilan menyebabkan orang bekerja lebih banyak karena ia ingin mempertahankan pendapatan riil yang sama sewaktu sebelum adanya pajak. Pajak penghasilan dapat juga menyebabkan orang tidak menambah atau mengurangi jam kerjanya. Apabila efek substitusi lebih dominan daripada efek pendapatan maka pajak penghasilan menyebabkan orang mengurangi jam kerjanya dan menambah waktu luang. Sebaliknya,



orang akan menambah waktu kerja apabila efek pendapatan lebih dominan daripada efek substitusi.

2. Pengaruh pajak penghasilan terhadap investasi

Asumsi dasarnya permintaan akan investasi tergantung dari sejauh mana produktivitas marjinal dari suatu investasi. Semakin tinggi tingkat bunga semakin sedikit investasi yang menguntungkan, sebaliknya semakin rendah tingkat bunga maka akan semakin banyak investasi yang menguntungkan. Apabila penawaran akan investasi adalah inelastis terhadap tingkat pengembalian tabungan, maka jumlah investasi total tidak terpengaruh oleh adanya pajak penghasilan. Apabila penawaran akan investasi memiliki elastisitas yang positif terhadap tingkat pengembalian tabungan, maka investasi total akan berkurang dengan adanya pajak penghasilan. Analisis ini dibuat dengan asumsi, risiko berada pada tingkat yang paling minimal.

Dalam kenyataannya, investasi merupakan suatu tindakan yang mengandung risiko, sebab investasi yang dilakukan mungkin menghasilkan keuntungan tetapi mungkin juga mengalami kerugian. Apabila pajak penghasilan memungkinkan seseorang yang pada suatu saat menderita kerugian dapat mengkompensasikan sepenuhnya kerugian tersebut dengan keuntungan yang diperoleh pada saat yang lain, maka pajak penghasilan akan mengurangi laba tetapi juga akan mengurangi kerugian yang dialami. Pada pajak penghasilan dengan tarif proporsional, kemungkinan untuk mendapatkan laba dan rugi akan berkurang dengan tingkat yang sama.

Dengan demikian pajak penghasilan dapat meningkatkan atau mengurangi hasrat orang untuk mengambil risiko dalam melakukan suatu investasi.

F. Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Produk domestik bruto setelah dikurangi dengan penyusutan dan penyesuaian pajak tidak langsung (pajak-subsidi) sama dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total dari penerimaan upah, gaji, sewa, bunga, dan laba, yang diterima oleh para pemilik faktor produksi sebagai balas jasa atas sumbangan mereka dalam proses produksi selama satu tahun. Artinya produk domestik bruto mencerminkan tingkat kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh masyarakat yang ada didalamnya.

Pajak penghasilan adalah sebagian pendapatan dari masyarakat yang diserahkan kepada negara. Penyerahan ini bersifat wajib dengan asumsi uangnya akan digunakan untuk membiayai kepentingan publik. Pemerintah memiliki legalitas yang sangat kuat untuk melakukan pemungutan pajak, termasuk secara paksa karena pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang. Jada tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak membayar pajak, ketika dirinya termasuk dalam klasifikasi warga negara yang harus membayar pajak.

Semakin besar produk domestik bruto berarti akan semakin besar bagian dari pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membayar pajak. Apalagi bila tarif pajak yang digunakan adalah bersifat progresif, karena semakin tinggi

pendapatan seseorang maka akan semakin besar bagian dari pendapatannya yang akan digunakan untuk membayar pajak.

Maka dengan sendirinya bisa dikatakan bahwa semakin besar produk domestik bruto, maka akan semakin besar pula penerimaan pajak penghasilan yang akan diperoleh oleh sebuah negara. Hanya saja proses pemungutan pajak dan perhitungannya dilakukan oleh aparat birokrasi pajak. Kerja yang tidak efektif dan efisien, korupsi, pungli menjadi hal yang sulit dilepaskan dari birokrasi. Dengan demikian, aparat birokrasi bisa saja menjadi faktor yang mendistorsi penerimaan pajak, yang menyebabkannya tidak proporsional dengan produk domestik bruto.

Setiap negara biasanya menentukan ratio penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto. Ratio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto ini menunjukkan seberapa besar dari bagian produk domestik bruto yang digunakan untuk membayar pajak. Tidak ada angka pasti berapa angka ratio ini dikatakan dalam keadaan ideal, artinya tidak mengganggu stabilitas ekonomi. Namun bila dibandingkan dengan negara lain angka ratio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto Indonesia pada angka 13%, jauh berada dibawah negara-negara lainnya. Jepang, AS, Swedia, Inggris, Korsel, India masing-masing mencapai angka 18,6%, 19,8%, 54,2%, 39,3%, 16,7%, dan 16,19%. Sementara Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina, masing-masing mencapai angka 15,8%, 36,6%, 21,4%, 18,8%, dan 16,3%. (Sunarsip, Media Indonesia, 1/4/02).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus pada negara Indonesia. Hasil penelitian ini hanya berlaku bagi negara yang diteliti yaitu negara Indonesia dan tidak berlaku umum bagi negara-negara lainnya.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pusat Statistik (BPS) pusat serta Badan Pusat Statistik (BPS) propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah produk domestik bruto Indonesia dan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1980-1999.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu penelitian selama bulan Maret 2002

2. Tempat penelitian

Tempat penelitian pada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pusat Statistik (BPS) pusat serta Badan Pusat Statistik propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Data Penelitian

1. Data penerimaan pajak penghasilan Indonesia dari tahun 1980 sampai 1999.
2. Data produk domestik bruto Indonesia dari tahun 1980 samapai 1999.

E. Variabel Penelitian dan Pengukurannya

1. Produk domestik bruto

Variabel produk domestik bruto diukur berdasarkan nilai rupiahnya. Jumlah yang digunakan adalah seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik.

2. Penerimaan pajak penghasilan

Variabel penerimaan pajak penghasilan diukur berdasarkan nilai rupiah yang diterima oleh pemerintah Indonesia. Nilai rupiah yang digunakan adalah seperti yang dilaporkan Direktorat Jenderal Pajak.

F. Hipotesis

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis akan mengajukan hipotesis sebagai berikut : ada korelasi positif antara produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1980-1999.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara akan dilakukan terhadap Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Pajak dan para Pakar baik Pakar Ekonomi maupun Pakar Perpajakan. Wawancara dengan BPS dan Dirjen pajak dilakukan untuk memperoleh data mengenai produk domestik bruto dan penerimaan pajak penghasilan, mengetahui bagaimana teknik penghitungan yang dipakai, serta data pelengkap lainnya. Wawancara terhadap Pakar dilakukan untuk memperoleh masukan konseptual berkaitan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pelengkap baik mengenai produk domestik bruto maupun penerimaan pajak penghasilan yang telah dipublikasikan baik melalui buku, jurnal maupun media massa.

H. Teknik Analisis Data

Untuk lebih memudahkan penulis dalam pengolahan data, maka tehnik analisis data yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah dalam bentuk koefisiensi korelasi.

1. Korelasi

Korelasi adalah salah satu tehnik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan variabel X akan diikuti perubahan variabel Y secara teratur dengan arah yang sama atau dengan arah yang berlawanan.

Sedangkan yang dimaksud dengan koefisiensi korelasi adalah ukuran besar kecilnya atau kuat tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Koefisien korelasi dinyatakan dalam bentuk bilangan bergerak antara 0 sampai dengan +1 atau antara 0 sampai -1.

Apabila koefisien korelasi (r) mendekati +1 atau -1 berarti terdapat hubungan yang cukup kuat, bila mendekati 0 berarti terdapat hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan. Bila r sama dengan +1 atau -1 berarti terdapat hubungan yang positif sempurna atau hubungan negatif sempurna.

Metode koefisiensi korelasi yang akan digunakan adalah metode koefisiensi korelasi "Karl Pearson". Pada koefisiensi korelasi pearson ini selain menunjukkan besarnya korelasi juga akan diketahui arah dari hubungan antara variabel X dan variabel Y.

Rumus :

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

r = Koefisiensi korelasi

N = Jumlah frekuensi

X = Nilai produk domestik bruto dari tahun 1980-1999

Y = Nilai penerimaan pajak penghasilan dari tahun 1980-1999

2. Test koefisiensi korelasi

Untuk menganalisa koefisiensi korelasi tersebut benar-benar menunjukkan hubungan yang positif antara produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan, maka akan diuji kebenarannya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Merumuskan hipotesis

Hipotesis Nol

$H_0 : \rho = 0$, tidak ada hubungan antara produk domestik bruto dengan penerimaan pajak penghasilan.

Hipotesa Alternatif

$H_a : \rho \neq 0$, ada hubungan antara produk domestik bruto dengan penerimaan pajak penghasilan.

b. Menentukan level of signifikan yaitu $\alpha = 0,05$. Artinya diharapkan bahwa pengujian tersebut kemungkinan melesetnya hanya sekitar 5%. Sedangkan derajat kebebasannya (df) = n-2.

c. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis

H_0 diterima jika : $(\alpha/2; n-2) \leq t \leq (\alpha/2; n-2)$

H_a diterima jika : $t > (\alpha/2; n-2)$ atau $t < -(\alpha/2; n-2)$

d. Statistik uji t

Rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

BAB IV
GAMBARAN UMUM PRODUK DOMESTIK BRUTO
DAN PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA

A. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia

a. Perekonomian yang berorientasi pertumbuhan

Penerapan teori Keynes untuk merekonstruksi negara-negara sedang berkembang mengalami masa keemasannya antara tahun 1950-1970. Terlepas dari bentuknya yang beraneka ragam, teori-teori dan doktrin-doktrin pembangunan tersebut memiliki kesamaan komposisi. Teori ini mendefinisikan pembangunan hanya sebagai pertumbuhan PDB, maka seluruh model dan doktrin jelas memandang pembangunan sebagai sebuah proses yang linier. (Muhadi Sugiono, 1999:102).

Karya Rostow adalah salah satu pendapat yang memiliki pengaruh yang cukup luas di negara sedang berkembang. Dari lima tahap proses pembangunan linier Rostow, negara berkembang dikatakan sudah mencapai tiga tahap pertama, yakni tahap lepas landas. Tahap lepas landas dianggap sebagai tahap yang paling krusial dalam keseluruhan proses pembangunan ekonomi, yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu negara untuk memenggal “lingkaran setan kemiskinan”. Faktor penentu dalam pemenggalan lingkaran setan kemiskinan menurut Rostow adalah adanya akumulasi modal yang cukup besar.

Alur pikir seperti inilah yang diadopsi oleh pengambil kebijakan ekonomi di Indonesia selama ini. Pertumbuhan PDB dijadikan indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan di Indonesia> Kebijakan ekonomi yang diambil murni bersifat teknokratis dan mengabaikan aspek-aspek di luar ekonomi. Pertumbuhan PDB di Indonesia memang memperlihatkan pertumbuhan yang cukup mengesankan yakni rata-rata 6,5% per tahun bahkan pernah mencapai lebih dari 8% per tahun.

Pertumbuhan PDB Indonesia yang begitu tinggi ternyata meninggalkan sekian banyak persoalan. Persoalan yang paling dominan adalah pertumbuhan PDB ternyata tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan di masyarakat. Asumsi ekonomi bahwa ketika ada pertumbuhan PDB yang tinggi, maka dengan sendirinya akan terjadi pemerataan (*trickle down effect*) tidak menjadi kenyataan. Kegiatan ekonomi terpusat pada kelompok-kelompok usaha besar (formal), dengan mengabaikan usaha menengah dan kecil (informal). Terjadi disparitas baik antara sektor usaha bahkan antar wilayah. Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang sangat krusial, walaupun secara teoritis pertumbuhan PDB tidaklah seharusnya meninggalkan persoalan semacam ini. Perbandingan pendapatan 10% penduduk termiskin dengan 10% penduduk terkaya telah meningkat dari 1:65 menjadi 1:87, sedangkan 200 konglomerat terbesar diperkirakan menguasai 58% produk domestik bruto Indonesia.

b. Pergeseran struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri

Sektor ekonomi tradisional diwakili oleh sektor pertanian, sedangkan sektor ekonomi modern diwakili oleh sektor industri. Berjalannya kedua sektor ini secara bersama-sama di Indonesia sering disebut sebagai perekonomian yang bersifat dualistik.

Awalnya Indonesia sering menyebutkan dirinya sebagai bangsa agraris karena memang keunggulan komparatif Indonesia berada pada sektor pertanian. Sejak pembangunan lima tahun (pelita) I sektor industri tumbuh dengan rata-rata 14% per tahun, akibatnya sumbangan sektor industri terhadap produk domestik bruto meningkat secara drastis yaitu dari 19% pada tahun 1970 menjadi 41% pada tahun 1991. Keadaan sebaliknya terjadi pada sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan yang lebih lamban dibandingkan sektor industri. Sumbangan sektor pertanian terhadap produk bruto, bila pada tahun 1970 masih sebesar 45%, maka pada tahun 1990 bergerak turun hingga hanya tinggal 19%.

Pergeseran struktur perekonomian ini ternyata tidak diikuti oleh pergeseran tenaga kerja antar sektor. Dalam periode 1970 sampai 1991, prosentase tenaga kerja yang bekerja di sektor industri hanya meningkat dari 11% menjadi 17%. Sedangkan prosentase tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian hanya turun dari 67,5% menjadi 55%. (Revisind Baswir, 1997:13).

Pergeseran semacam ini terjadi sebagai sebuah dampak dari strategi kebijakan dan prioritas pembangunan. Munculnya dampak berupa disparitas

sosial ekonomi, menunjukkan bahwa peralihan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern membutuhkan persiapan yang cukup matang seperti perbaikan kualitas sumber daya manusia, alih teknologi dan berbagai prasarana pendukung lainnya. Namun cukup naif apabila pengambil kebijakan benar-benar mengabaikan sektor pertanian dan sektor informal lainnya, karena sektor ini terbukti cukup mampu bertahan ketika terjadi kemunduran ekonomi yang cukup besar.

B. Perpajakan Di Indonesia

a. Reformasi perpajakan

Sistem perpajakan yang berlaku sebelum adanya pembaharuan adalah sistem atau perundang-undangan pajak yang dibuat pada jaman kolonial Belanda, misalnya ordonansi pajak perseroan 1952, ordonansi pajak kekayaan 1932, dan ordonansi pajak pendapatan 1944. Pajak pada masa kolonial yang sangat diskriminatif, sangat membebani masyarakat dan menimbulkan semacam trauma bagi masyarakat yang tidak begitu saja lenyap sekalipun Indonesia telah memperoleh kemerdekaannya.

Menurut Salamun.A.T. (1980), ditinjau dari segi ketatanegaraan, landasan pemikiran, sasaran dan tujuannya, produk perundang-undangan pajak masa kolonial tidak relevan lagi bagi bangsa Indonesia yang telah memperoleh kemerdekaan. Selain itu perundang-undangan pajak lama terdapat beberapa kelemahan, pertama, peraturan pajak yang beraneka ragam, menimbulkan

kesan membingungkan bahkan terdapat pembebanan pajak berganda. Kedua, pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat pajak. Sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat wajib pajak kurang turut bertanggung jawab memikul beban negara yang pada hakekatnya adalah untuk kepentingan sendiri dalam bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan. Ketiga, terdapat berbagai jenis pajak sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat dalam memikul kewajibannya.

Keempat, terdapat bermacam-macam tarif baik untuk perseorangan maupun untuk perseroan, dan juga tarif beraneka ragam dalam pajak penjualan, disamping adanya tarif khusus untuk koperasi, perusahaan yang *go public* dan perusahaan yang diperiksa oleh akuntan, yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Kelima, walaupun struktur tarif dalam sistem lama sudah cukup progresif tetapi tingginya tarif-tarif tersebut menimbulkan rangsangan untuk menghindari pajak dengan berbagai macam cara. Keenam, tata cara pemungutan pajak terlalu berbelit-belit.

Reformasi perpajakan gelombang pertama dimulai pada tahun 1983, dan dalam reformasi gelombang pertama ini menimbulkan penyederhanaan dalam sistem perpajakan nasional. Selain itu juga terjadi perubahan dalam sistem pemungutan pajak dari *self official system* ke *self assesment system*. Reformasi perpajakan ini menghasilkan undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, undang-undang nomor 8 tahun 1983

tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, undang-undang nomor 12 tahun 1983 tentang pajak bumi dan bangunan, dan undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang bea materai.

Reformasi perpajakan gelombang kedua dilakukan tahun 1994. Sejalan dengan perkembangan yang ada disadari ternyata banyak masalah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sehingga menuntut perlunya penyempurnaan. Dengan alasan tersebut maka pada akhir tahun 1994, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 9, 10, 11, dan 12 sebagai penyempurnaan atas undang-undang pajak yang lama. Penyempurnaan ini sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah dalam pembangunan jangka panjang kedua. (Mardiasmo, 2001:13). Penyempurnaan terakhir terhadap undang-undang perpajakan dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2000.

b. Perkembangan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan

Sejak tahun 1972 sampai 1986, Indonesia diuntungkan dengan ditemukannya banyak cadangan minyak dan gas alam, serta peningkatan harganya dipasar internasional. Penerimaan dari minyak bumi dan gas alam pada pelita II mencakup rata-rata 55% dari penerimaan dalam negeri, dan jumlah ini meningkat bahkan pernah sampai pada angka 70,1% pada Pelita III.

Merosotnya harga minyak bumi mulai Agustus tahun 1986 menjadi hanya sekitar \$9 sampai \$10 per barrel, mengakibatkan semakin menurunnya

peranan minyak bumi dan gas alam pada penerimaan dalam negeri. Untuk menjaga citra pemerintah, tidak sedikit jumlah hutang yang harus dibuat pemerintah untuk meneruskan pembangunan. Memiliki jumlah hutang yang terlampau besar, ternyata bukanlah keadaan yang menguntungkan Indonesia, karena menimbulkan beban masa depan yang kadang-kadang mengganggu stabilitas perekonomian domestik. Menurut Menteri Koordinator Perekonomi Dorojatun Kuntjoro-Jakti, sampai akhir Desember 2001 posisi hutang Indonesia mencapai Rp. 1.401 Trilyun dengan kurs nilai tukar Rp. 10.000 per dollar AS. Ini tentu saja jauh melebihi batas kewajaran hutang sebuah negara (*debt ratio*) yang hanya sebesar 30% dari PDB. (Kompas,12/2/2002).

Alternatif terakhir yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk menutupi anggarannya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak sebenarnya mengalami peningkatan yang terus menerus, misalnya pada akhir Pelita III baru berjumlah Rp. 2,99 Trilyun, pada akhir pelita V meningkat cukup drastis menjadi Rp. 30,41 Trilyun. Dilihat dari proporsi terhadap penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak juga mengalami peningkatan, misalnya pada tahun anggaran 1986/1987, penerimaan pajak meliputi 47% dari penerimaan dalam negeri, dan jumlah ini meningkat menjadi 61,6% pada tahun anggaran 1992/1993, dan menjadi 63,2% pada tahun anggaran 1997/1998. (data BPS, beberapa tahun).

Upaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak juga sangat tergantung dari kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Jika masyarakat belum sadar.

Maka selama masih ada peluang untuk menghindari, orang tidak akan membayar pajak. Tinggi rendahnya kesadaran masyarakat sangat terkait dengan kesadaran politiknya, yang pada hakekatnya bermula dari kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pemerintah yang bersih dan berwibawa akan menjadi faktor kondusif bagi meningkatnya ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. Sebaliknya suatu pemerintahan yang tidak mampu mencegah meningkatnya korupsi, pungli, upeti, komersialisasi jabatan dan penyelewengan lainnya akan sukar untuk meningkatkan ketaatan membayar pajak secara maksimum. (Bomer Pasaribu, dalam Yozar Anwar, Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan, 1990:72).

Machfud Siddik, yang kini sudah menjadi mantan Direktur Jenderal Pajak menyebutkan paling tidak ada tiga hal yang harus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pertama, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, yang menjadi tulang punggung *self assesment system*. Elemen yang harus ada agar *self assesment system* dapat diterapkan secara efektif diantaranya pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, prosedur yang sederhana dan memudahkan, program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif dan pemantauan *law enforcement* yang tegas dan adil. Kedua, melakukan pendekatan terpadu dalam proses penerimaan pajak. Masalah yang timbul pada satu tahap proses penerimaan pajak kemungkinan akan mempengaruhi tahap lainnya. Ketiga, melakukan reformasi perpajakan secara berkesinambungan. Tujuan dari penyempurnaan undang-undang pajak adalah

untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sekaligus sebagai upaya meningkatkan keadilan pajak. (Bisnis Indonesia, 5/8/2000).

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi data

Lembaga pemerintah memberi laporan secara resmi kepada masyarakat setiap tahunnya tentang keadaan ekonomi Indonesia, terutama Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Disamping itu berbagai lembaga swasta sering juga melakukan penelitian atau kajian secara independen tentang keadaan ekonomi Indonesia. Pada kesempatan ini penulis menggunakan laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pertimbangan laporan BPS biasanya menjadi acuan utama dan relatif mudah untuk diperoleh. Terbitan yang digunakan adalah buku Pendapatan Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh badan pusat statistik dari berbagai tahun.

Badan Pusat Statistik melakukan penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pendekatan metode produksi dan metode pengeluaran. Jadi PDB dihitung dengan menjumlahkan produksi yang dilakukan oleh berbagai sektor dan dari berbagai unit usaha selama satu tahun. Penelitian ini mengambil sampel selama dua puluh tahun yakni dari tahun 1980 sampai tahun 1999, dengan pertimbangan utama ketersediaan datanya. Berikut tabel PDB Indonesia selama periode 1980-1999 :

Tabel 5.1
Produk Domestik Bruto
Indonesia Periode 1980 – 1999
(Dalam Milyar Rupiah).

No.	Tahun	PDB
1	1980	11.169,2
2	1981	12.054,6
3	1982	12.325,4
4	1983	77.676,3
5	1984	78.144,4
6	1985	80.199,6
7	1986	90.080,5
8	1987	94.517,8
9	1988	99.981,4
10	1989	107.436,6
11	1990	115.217,3
12	1991	123.225,2
13	1992	131.184,8
14	1993	329.775,8
15	1994	354.640,8
16	1995	383.792,3
17	1996	413.797,9
18	1997	433.245,9
19	1998	376.374,9
20	1999	379.557,7

Sumber : Pendapatan Nasional Indonesia, BPS Berbagai Tahun

Pajak penghasilan yang akan dianalisis adalah data pajak penghasilan secara total. Data yang akan digunakan adalah data resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ketika penelitian dilakukan. Jumlah penerimaan pajak penghasilan total mengikuti periode tahun anggaran pemerintah yang lama yakni dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya (mulai tahun 2000 anggaran pemerintah mengikuti tahun takwin yakni dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember). Maka untuk memudahkan analisis, data pajak penghasilan di rata-ratakan supaya bisa dibandingkan dengan periode tahun yang sama. Misalnya penerimaan pajak

penghasilan untuk tahun anggaran 1989/1990 adalah 5.754,8 Milyar dan untuk tahun anggaran 1990/1991 adalah 8.250,0 Milyar. Maka penerimaan pajak penghasilan untuk tahun 1990 adalah sebesar $\frac{3}{12} \times 5.754,8$ Milyar ditambah dengan $\frac{9}{12} \times 8.250,0$ Milyar yang hasilnya adalah 7.626,2 Milyar. Tabel berikut mencerminkan data penerimaan pajak penghasilan yang sudah dirata-ratakan. Perhitungan rata-rata keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 1.

Tabel 5.2
Penerimaan Pajak Penghasilan
Indonesia Periode 1980 – 1999
(Dalam Milyar Rupiah)

No.	Tahun	PPH
1	1980	1.034,5
2	1981	1.285,9
3	1982	1.593,2
4	1983	1.896,6
5	1984	2.024,3
6	1985	2.063,8
7	1986	2.469,7
8	1987	2.807,9
9	1988	4.043,2
10	1989	5.424,2
11	1990	7.626,2
12	1991	9.357,8
13	1992	11.818,9
14	1993	14.198,3
15	1994	17.762,8
16	1995	20.450
17	1996	25.549,6
18	1997	32.556,7
19	1998	50.554,7
20	1999	58.747,9

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, Diolah (lihat lampiran 1)

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak penghasilan

Untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan oleh penulis pada bab sebelumnya maka dilakukan perhitungan kuantitatif berdasarkan rumus Karl Pearson sebagai berikut :

Tabel 5.3
Perhitungan Koefisiensi Korelasi
Berdasarkan Rumus Karl Pearson
(Dalam Milyar Rupiah)

PDB (X)	Pajak Penghasilan (Y)	XY	X ²	Y ²
11.169,2	1.034,5	11.554.537,4	124.751.028,6	1.070.190,3
12.054,6	1.285,9	15.501.010,1	145.313.381,2	1.653.538,8
12.325,4	1.593,2	19.636.827,3	151.915.485,2	2.538.286,2
77.676,3	1.896,6	147.320.870,6	6.033.607.581,7	3.597.091,6
78.144,4	2.024,3	158.187.708,9	6.106.547.251,4	4.097.790,5
80.119,6	2.063,8	165.350.830,5	6.419.150.304,2	4.259.270,4
90.080,5	2.469,7	222.471.810,9	8.114.496.480,3	6.099.418,1
94.517,8	2.807,9	265.396.530,6	8.933.614.516,8	7.884.302,4
99.981,4	4.043,2	404.244.796,5	9.996.280.346,0	16.347.466,2
107.436,6	5.424,2	582.757.605,7	11.542.623.019,6	29.421.945,6
115.217,3	7.626,2	878.670.173,3	13.275.026.219,3	58.158.926,4
123.225,2	9.357,8	1.153.116.776,6	15.184.449.915,0	87.568.420,8
131.184,8	11.818,9	1.550.460.032,7	17.209.451.751,0	139.686.397,2
329.775,8	14.198,3	4.682.255.741,1	108.752.078.265,6	201.591.722,9
354.640,8	17.762,8	6.299.413.602,2	125.770.097.024,6	315.517.063,8
383.792,3	20.450,0	7.848.552.535,0	147.296.529.539,3	418.202.500,0
413.797,9	25.549,6	10.572.370.825,8	171.228.702.044,4	652.782.060,2
433.245,9	32.556,7	14.105.056.792,5	187.702.009.866,8	1.059.938.714,9
376.374,9	50.554,7	19.027.520.157,0	141.658.065.350,0	2.555.777.692,1
379.557,7	58.747,9	22.298.217.803,8	144.064.047.629,3	3.451.315.754,4
3,704,318.4	273,266.2	90,408,056,968.6	1,129,708,757,000.2	9,017,508,552.9

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

$$r = \frac{20 \times 90.408.056.968,6 - (3.704.318,4)(273.266,2)}{\sqrt{20 \times 1.129.708.757.000,2 - 13.721.974.808.578,6} \sqrt{20 \times 9.017.508.552,9 - 74.674.416.062,4}}$$

$$r = \frac{1.808.161.139.372,0 - 1.012.265.012.758,1}{\sqrt{22.549.157.140.004,0 - 13.721.947.808.576,6} \sqrt{180.350.170.458,0 - 74.674.416.062,4}}$$

$$r = \frac{795.898.126.613,9}{\sqrt{8.872.200.331.425,4} \sqrt{105.675.754.395,6}}$$

$$r = \frac{795.898.126.613,9}{2.978.823,9 \times 325.078,1}$$

$$r = \frac{795.898.126.613,9}{968.285.321.159,0}$$

$$r = 0,822$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui koefisiensi korelasi (r) = 0,822. Ini berarti terdapat suatu hubungan yang positif antara produk domestik bruto (PDB) terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Dengan diketahuinya koefisiensi korelasi (r) = 0,822, maka diperoleh koefisien determinasi (r^2) = 0,68. Artinya pengaruh dari PDB terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia adalah sebesar 68 %.

Untuk meyakinkan bahwa koefisiensi korelasi tersebut benar-benar menunjukkan hubungan yang positif antara produk domestik bruto dan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia, maka akan dilakukan pengujian terhadap hasil penelitian ini, dengan cara sebagai berikut :

Test koefisiensi korelasi :

a. H_0 : $\rho = 0$: tidak ada korelasi antara produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.

H_a : $\rho \neq 0$: ada korelasi antara produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.

b. Ditentukan $\alpha = 0,05$

c. Kriteria pengujian

H_0 diterima apabila : $-(\alpha/2; n-2) \leq t \leq (\alpha/2; n-2)$

H_0 ditolak apabila : $-t > (\alpha/2; n-2)$ atau $t < -(\alpha/2; n-2)$

d. Statistik uji t

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

$$t = \frac{0,822\sqrt{20-2}}{\sqrt{1-(0,822)^2}}$$

$$t = \frac{0,822 \times 4,243}{\sqrt{0,324}}$$

$$t = \frac{3,488}{0,569}$$

$$t = 5,852$$

Pada $\alpha = 0,025$; $df = 18$; $t \text{ tabel} = 2,101$

Oleh karena $t \text{ hitung } 5,852 > t \text{ tabel sebesar } 2,101$, maka terbukti terdapat korelasi positif yang kuat antara produk domestik bruto dengan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa produk domestik bruto mempengaruhi secara positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Artinya bila terjadi kenaikan pada PDB, maka akan terjadi pula kenaikan penerimaan pajak penghasilan oleh pemerintah. Pengaruh PDB terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia ini bisa dikatakan cukup signifikan karena memiliki koefisien derterminasi (r^2) = 0,68.

Hasil penelitian ini membenarkan hipotesis yang sudah diajukan penulis sebelum dilakukannya penelitian ini, yakni diduga ada korelasi yang positif antara PDB terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh United Nation Commission For Asia and Far East, yang menunjukkan adanya korelasi yang positif antara pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak.

Jumlah penerimaan pajak penghasilan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang terus menerus. Bila pada tahun anggaran 1980/1981 hanya terkumpul 1,11 Trilyun, maka pada tahun anggaran 1998/1999 jumlah penerimaan pajak penghasilan sudah mencapai 55,94 Trilyun. Pajak penghasilan juga memiliki jumlah penerimaan yang paling besar bila



dibandingkan dengan jumlah pajak lainnya. Misalnya pada tahun anggaran 1998/1999 pajak penghasilan terkumpul sejumlah 55,94 Trilyun, pajak pertambahan nilai terkumpul sebanyak 27,79 Trilyun, pajak bumi dan bangunan 3,57 Trilyun, dan pajak lain-lain terkumpul sejumlah 0.41 Trilyun.

Besarnya jumlah penerimaan pajak penghasilan bila dibandingkan dengan besarnya jumlah penerimaan pajak jenis lain menunjukkan gejala yang baik, yakni semakin membaiknya struktur perpajakan nasional. Artinya semakin besar jumlah pajak penghasilan (pajak langsung) yang diterima pemerintah, semakin banyak pula masyarakat dari kalangan menengah ke atas yang membayar pajak dibandingkan dengan masyarakat menengah ke bawah. Perbaikan struktur pajak ini baru mulai terjadi setelah reformasi perpajakan kedua tahun 1995. Pada kurun waktu tahun 1985 sampai 1994 struktur pajak di Indonesia tidak begitu baik, pajak langsung jumlahnya mendekati jumlah perolehan dari pajak tidak langsung, bahkan terkadang jumlah pajak tidak langsung lebih besar. Misalnya pada tahun anggaran 1987/1988, pajak penghasilan yang diterima pemerintah berjumlah 2,88 Trilyun sedangkan pajak pertambahan nilai yang diterima pemerintah berjumlah 3,83 Trilyun.

Direktorat Jenderal Pajak baru melakukan penghitungan sesuai dengan klasifikasi pajak penghasilan, yakni pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 sejak tahun 1994. Pada tahun-tahun sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan penghitungan secara total. Artinya baru sejak tahun 1994 dimungkinkan untuk diketahui berapa kontribusi masing-masing dari setiap jenis pajak penghasilan.

Jumlah penerimaan pajak di Indonesia masih berada dibawah kemampuan potensialnya. *Tax coverage* Indonesia selama ini hanya 50-65 %, ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan pencapaian negara-negara ASEAN yang sampai pada angka 80 %. Indikator yang lebih baik untuk mengukur potensi pajak penghasilan di Indonesia adalah pendapatan personal. Pendapatan personal didefinisikan sebagai *gross national product* dikurangi dengan penyusutan, pajak-pajak tidak langsung, dan keuntungan yang tidak dibagikan serta pembayaran transfer. Pendapatan personal ini merupakan pendapatan yang betul-betul diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam tahun tertentu.

Di Indonesia diperkirakan terdapat kira-kira 5 juta rumah tangga yang seharusnya menjadi wajib pajak pada tahun 1987. Apabila pemerintah baru berhasil menjaring 1,2 juta wajib pajak, berarti masih kira-kira 76 % rumah tangga yang potensial menjadi wajib pajak. Pada tahun 1987 pendapatan nasional masyarakat Indonesia diperkirakan Rp. 117,92 Trilyun, apabila diasumsikan potensi penerimaan pajak penghasilan sebesar 10 % dari penghasilan nasional, berarti potensi pajak penghasilan di Indonesia tahun 1987 sebesar Rp. 11,79 Trilyun. Dengan demikian perkiraan penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp. 3,32 Trilyun pada tahun 1987, baru merupakan 28,23 % dari potensi pajak penghasilan pada tahun tersebut. (Guritno, 1998:67).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis statistik pengaruh produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1980-1999, yang telah dilakukan dan dibahas pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan :

1. Terdapat hubungan antara produk domestik bruto dan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1980-1999. Hubungan ini bersifat positif atau searah, hal ini ditunjukkan oleh perhitungan koefisiensi korelasi (r) dengan nilai 0,822.
2. Produk domestik bruto memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penerimaan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1980-1999. Hal ini ditunjukkan oleh perhitungan koefisiensi determinasi (r^2) dengan nilai 0,68.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1980-1999, penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, terbuka peluang untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak agar *tax coverage* bisa mencapai 80 % atau lebih. Penerimaan pajak penghasilan 32 %-nya tidak

ditentukan oleh tingkat produk domestik bruto, tetapi oleh faktor lain. Ini yang harus dikaji lebih jauh oleh Direktorat Jenderal Pajak. Prosentase jumlah pembayar pajak dibandingkan dengan jumlah penduduk masih sangat kecil, oleh karena itu terbuka peluang untuk menambah jumlah wajib pajak.

2. Bagi penelitian selanjutnya terbuka peluang untuk meneliti pengaruh faktor-faktor lain, selain produk domestik bruto, yang berpotensi mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan di Indonesia misalnya tingkat keterbukaan sistem ekonomi, tingkat moneterisasi, tingkat kapasitas administrasi pajak, kemauan memungut pajak, dan perangkat undang-undang pajak.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa dikatakan masih sangat sederhana, penelitian ini hanya ditujukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Artinya penelitian ini mengabaikan faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan spesifikasi data dari Direktorat Jenderal Pajak. Perhitungan jumlah nominal penerimaan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengikuti tahun anggaran pemerintah yakni dari 1 April sampai 31 Maret tahun berikutnya. Sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap produk

domestik bruto sesuai dengan tahun takwin yakni dari 1 Januari sampai 31 Desember. Agar produk domestik bruto bisa dibandingkan dengan penerimaan pajak penghasilan, maka pajak penghasilan dirata-ratakan terlebih dahulu. Jadi penerimaan pajak penghasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan yang sudah dirata-ratakan, bukan jumlah nominal yang benar-benar diperoleh pemerintah dalam tahun yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrisond. (1997). *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IDEA.
- Budiman, Arief. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyuwono, Noegroho. (1999). *Pengantar Statistik Ekonomi dan perusahaan (jilid 1)*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Chairul, Tubagus. (1992). *Perpajakan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama dan PAU-EK Universitas Indonesia.
- Djarwanto dan Subagyo. (1993). *Statistik Induktif*. Yogyakarta : BPF
- Edi.S dan Lumban, Goal. (1991). *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fisher, Stanley dan Rudiger D. (1997). *Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Gilarso.T. (1991). *Ilmu Ekonomi (Bagian Makro)*. Yogyakarta : Kanisius
- Hasibuan, Nurmansjah. (1993). *Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi*. Palembang: Penerbit Unsri.
- Indrianto.N dan Supomo, Bambang. (1999). *Metodologi penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Membangun Ditengah Pusaran Hutang (kumpulan tulisan)*. (1996). Yogyakarta : Interfidei
- Judisseno, Rimsky. (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kompas*, 12 Februari 2002.
- Mardiasmo. (2001). *Perpajakan (Edisi ketujuh)*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mangkoesoebroto, Guritno. (1998). *Ekonomi Publik*. YogyakartaL: BPF.
- Malik, Fauzi. (1997). *Modul pemotongan Pajak Penghasilan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak.

Prasetyantono, Tony. (1995). *Agenda Ekonomi Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pendapatan Nasional Indonesia (berbagai tahun) : Badan Pusat Statistik.

Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan (kumpulan tulisan). (1990) : PT. Bina Rena Pariwara.

Rachbini, Didik. (1995). *Risiko Membangun yang Dibimbing Hutang*. Jakarta : PT. Grasindo.

Salamun. A.T. (1990). *Pajak, Citra dan Bebannya*. Jakarta : PT. Bina Rena Aksara.

Schrijvers, Joke. (1998). *Kekerasan Pembangunan*. Jakarta : Media Pressindo.

Siddik, Machfud. (2000, 5 Agustus). Strategi Perpajakan Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi. *Bisnis Indonesia*.

Singh, Kavaljit. (1998). *Memahami Globalisasi Keuangan*. Jakarta : Yakoma-PGI.

Soemitro, Rachmat. (1988). *Pajak dan Pembangunan*. Bandung : PT. Eresco.

Soemitro, Rachmat. (1985). *Pajak Penghasilan 1984*. Bandung : PT. Eresco.

Soemitro, Rachmat. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Bandung : PT. Eresco.

Sugiono, Muhadi. (1999). *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sunarsip. (2002, 1 April). Menimbang Strategi Menaikan Tax Ratio. *Media Indonesia*.

Todaro, Michael.P. (1997). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.

Triyanto Widodo, Suseno. (1993). *Indikator Ekonomi (dasar perhitungan perekonomian indonesia)*. Yogyakarta : Kanisius.

Undang-Undang Perpajakan 1994. (1995). Bandung : PT. Citra Umbara.

Yozar, Anwar. (1990). *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara.

Lampiran 1

**Konversi Data Pajak Penghasilan
Dari Tahun Anggaran Pemerintah ke Tahun Takwin
(Dalam Milyar Rupiah)**

Sebelum di Rata-rata		Sesudah di Rata-rata			
Th. Anggaran	Pajak Penghasilan	Tahun	Perhitungan		Pajak Penghasilan
1979/1980	798,7	1980	25% x 798,7 =	199,7	1.034,5
			75% x 1.113,1 =	834,8	
1980/1981	1.113,1	1981	25% x 1.113,1 =	278,3	1.285,9
			75% x 1.343,5 =	1.007,6	
1981/1982	1.343,5	1982	25% x 1.343,5 =	335,9	1.593,2
			75% x 1.676,4 =	1.257,3	
1982/1983	1.676,4	1983	25% x 1.676,4 =	419,1	1.896,6
			75% x 1.970,0 =	1.477,5	
1983/1984	1.970,0	1984	25% x 1.970,0 =	492,5	2.024,3
			75% x 2.042,4 =	1.531,8	
1984/1985	2.042,4	1985	25% x 2.042,4 =	510,6	2.063,8
			75% x 2.070,9 =	1.553,2	
1985/1986	2.070,9	1986	25% x 2.070,9 =	517,7	2.469,7
			75% x 2.602,7 =	1.952,0	
1986/1987	2.602,7	1987	25% x 2.602,7 =	650,7	2.807,9
			75% x 2.876,2 =	2.157,2	
1987/1988	2.876,2	1988	25% x 2.876,2 =	719,0	4.043,2
			75% x 4.432,3 =	3.324,2	
1988/1989	4.432,3	1989	25% x 4.432,3 =	1.108,1	5.424,2
			75% x 5.754,8 =	4.316,1	
1989/1990	5.754,8	1990	25% x 5.754,8 =	1.438,7	7.626,2
			75% x 8.250,0 =	6.187,5	
1990/1991	8.250,0	1991	25% x 8.250,0 =	2.062,5	9.357,8
			75% x 9.727,0 =	7.295,3	
1991/1992	9.727,0	1992	25% x 9.727,0 =	2.431,7	11.818,9
			75% x 12.516,3 =	9.387,2	
1992/1993	12.516,3	1993	25% x 12.516,3 =	3.129,1	14.198,3
			75% x 14.758,9 =	11.069,2	
1993/1994	14.758,9	1994	25% x 14.758,9 =	3.689,7	17.762,8
			75% x 18.764,1 =	14.073,1	
1994/1995	18.764,1	1995	25% x 18.764,1 =	4.691,0	20.450
			75% x 21.012,0 =	15.759	
1995/1996	21.012,0	1996	25% x 21.012,0 =	5.253	25.549,6
			75% x 27.062,1 =	20.296,6	
1996/1997	27.062,1	1997	25% x 27.062,1 =	6.765,5	32.556,7
			75% x 34.388,3 =	25.791,2	
1997/1998	34.388,3	1998	25% x 34.388,3 =	8.597,1	50.554,7
			75% x 55.943,5 =	41.957,6	
1998/1999	55.943,5	1999	25% x 55.943,5 =	13.985,9	58.747,9
			75% x 59.682,7 =	44.762,6	
1999/2000	59.682,7				

Lampiran 2

Nilai t

d.f.	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$F_{0.005}$	d.f.
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	1
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	2
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	3
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	4
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	6
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	7
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	8
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	9
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	10
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	11
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	12
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	13
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	14
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	15
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	16
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	17
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	18
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	19
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	20
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	21
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	22
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	23
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	24
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	25
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	26
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	27
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	28
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	29
inf.	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	inf.

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama Lengkap : Theodorus Dedi.D
Tempat, Tgl. Lahir : Kutai Barat, 12 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Menikah
Alamat Asal : Jl. S. Mahengen No. 62 RT.II
Linggang Amer, Kec. Linggang Bigung,
Kutai Barat, Kalimantan Timur 75576

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 006, Bangun Sari, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.(1985-1991)
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri I Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. (1991-1994)
3. Sekolah Menengah Ekonomi Atas Katolik WR. Soepratman (Jurusan Akuntansi), Samarinda, Kalimantan Timur.(1994-1997)
4. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.(1997-Sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Staf Redaksi Majalah Mahasiswa “natas” Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.(1999)
2. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. (1999-2000)
3. Presidium Pendidikan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta.(1999-2001)
4. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta.(2001-2002)

